

Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam di Aceh (Lembaga Pendidikan Islam Dan Tokohnya)

Titi Mildawati ^{✉1}, Bahaking Rama²

^{1,2} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian mengangkat sebuah judul yaitu Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam Di Aceh dalam perspektif (Lembaga Pendidikan Islam Dan Tokohnya). Beberapa tokoh ulama telah memainkan peranan penting dalam Penyebaran Islam masa awal di Aceh dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mereka telah berjuang dan berkiprah dalam usaha memperkenalkan nilai-nilai Islam dan benar-benar mengajak masyarakat untuk melakukan syariat Islam dengan menyampaikan ajaran-ajaran ortodoksi (ajaran yang berpeganghanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunah). Dengan melalui karya-karya kitab yang disusunnya, dan dalam bahasa sastra yang indah sehingga pengamalan nilai-nilai ajarannya dengan mudah dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Bukti kejayaan dan kebesaran ulama- ulama besar tersebut kini dapat disaksikan sebagai saksi sejarah dengan masih adanya pusara/makam-makam di Banda Aceh dan di Kota Subulussalam. Tinggalan-tinggalan sejarah tersebut harus tetap dilindungi, dijaga dan dirawat agar dapat dilestarikan kepada generasi mendatang, sebagai cagar budaya.

Kata Kunci: Perkembangan Islam; Kerajaan Islam Di Aceh ; Pendidikan Islam Dan Tokohnya.

Copyright (c) 2023 Titi Mildawati

✉ Corresponding author :

Email Address : titi.mildawati@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Secara geografis, daerah Aceh, sekarang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian Utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling Barat wilayah Indonesia. Batas-batas Nanggroe Aceh Darussalam adalah: sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan

darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 57.365,57 km².¹

Asal-usul kerajaan Aceh tidak begitu jelas. Tetapi kemunculannya pada awal abad ke-16 M berhasil menarik keuntungan dari perkembangan baru yang terjadi di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Pelabuhan Goa di India dan Malaka di Semenanjung Malaya ditaklukkan oleh Portugis. Ini mengganggu sebagian lalu-lintas perdagangan antar-benua. Pelayaran yang dahulunya melalui Laut Merah, Kairo dan Laut Tengah menuju Eropah, kini dialihkan melalui Tanjung Harapan. Ini sangat merugikan pedagang-pedagang dari Kairo dan Venezia. Di Samudra Hindia sendiri yang paling dirugikan ialah para pedagang Muslim yang biasa berlayar antara Melabar dan Aden. Mereka terpotong oleh gangguan kapal-kapal Portugis. Sebagai pilihan mereka melakukan pelayaran lebih jauh dengan tujuan Sumatra yang banyak menghasilkan rempah-rempah seperti lada, kayu manis, barus dan lain-lain. Dahulu para pedagang ini merasa betah singgah di Malaka, tetapi kini mencari pelabuhan lain yang lebih menyenangkan di Sumatra.²

Pendidikan Agama Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia melalui Aceh. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertera dalam buku yang ditulis Haidar Putra Daulay bahwa pada tahap awal Pendidikan Agama Islam dimulai bersamaan dengan penyebaran ajaran Islam oleh para muballigh yang datang dari Gujarat. Para pendakwah Islam tersebut menyampaikan ajaran Islam melalui jalur pendidikan yang awalnya sederhana dengan memanfaatkan fasilitas privat seperti rumah dan juga fasilitas umum seperti rumah ibadah dan hingga sampai pada taraf yang lebih meluas hingga sampai ke istana kerajaan. Perkembangan selanjutnya adalah dimana para pendakwah yang alim itu kemudian mendirikan lembaga pendidikan khusus yang diberi nama dengan dayah (ucapan dalam bahasa Aceh) atau zawiyah (dari bahasa Arab) yang berarti pojok masjid yang dijadikan tempat khusus untuk mempelajari agama Islam dari pada guru atau ulama.³ Dalam Konteks keacehan, pendidikan berbasis syariat Islam bukanlah hal baru, namun ia merupakan bahagian dan isi dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasari kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa "keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah".⁴

¹ Lihat, *Aceh dalam Angka (Aceh in Figures)*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2003), hlm. 3

² Abduh Hadi WM dan Azymardi Azra, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam* (Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta, 2015), h. 315.

³ M. Sadli ZA, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang, dalam Abuddin Nata (Ed). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 34

⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/413

Pelaksanaan Syariat Islam secara formal diperkuat melalui Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Substansi mendasar yang dapat dicermati dalam undang-undang ini adalah adanya landasan dan payung hukum yang kuat serta memberi kesempatan yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri secara otonom dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, hukum, pendidikan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, penerapan syariat Islam, dan jalinan kerjasama serta kemitraan dengan berbagai lembaga dan Negara. Peraturan ini memang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas aspek-aspek apa saja yang diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh.⁵

Fauziah Nasution juga menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya Islam sampai ke daerah Nusantara bermula dari daerah Sumatera yaitu Barus, Aceh dan Pasai pada abad ke-12 s/d abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 s/d abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14 (1450 Masehi). Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15, yaitu pada tahun 1460. Selanjutnya sepuluh tahun kemudian Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480, dan berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan Demak 1575-1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon, pada tahun yang bersamaan yaitu 1525 atau abad ke-15 Masehi.⁶

Bergbagai pandangan dari kalangan ahli sejarah tentang awal mula masuknya Islam di Indosensia dan perkembangan pendidikan Islam khususnya di Aceh merupaakn awal mula berkembangnya kehidupan yang terarah, Lembaga pendidikan Islam di Aceh dikenal dengan nama Dayah, Dayah adalah lembaga pendidikan paling awal di Nusantara. Peran dan fungsinya dalam pembelajaran sosial telah menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan pada masa lalu. Dalam konteks Aceh, dayah bukan saja berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan sosial. Sebagai pusat pendidikan, dayah merupakan transformasi dan transmisi ilmu dari generasi ke generasi. Sebagai pusat dakwah, dayah menjadi pusat penyiaran agama kepada publik, sehingga kehadiran dayah benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, dayah telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat meskipun belum maksimal. Untuk memhami lebih Kompleks perkembangan Pendidikan Islam dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya di Aceh beserta tokoh dan ulama yang membesarkan pendidikan Islam tersebut maka makalah ini akan membahas tuntas tentang

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_18.pdf

⁶ Masruarini & Bahaking Rama, *Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh: Lembaga dan Tokohnya*, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, Vol. 2 No.2 Tahun 2022, h. 212.

“Perkembangan Pendidikan Islam di Aceh: Lembaga Pendidikan Islam dan Tokohnya”.

Pembahasan dan Hasil Analisis

A. Awal Mula Hingga Munculnya Kerajaan Islam di Aceh

Sudah menjadi maklumat bersama bahwa awal masuk dan berkembangnya Islam di kepulauan Melayu adalah di bumi Aceh.⁷ Kenyataan ini diungkapkan oleh sejumlah pakar sejarah, baik lokal maupun mancanegara. Thomas W. Arnold menyatakan bahwa Islam telah dibawa oleh para pedagang Arab sejak abad-abad pertama hijrah.⁸

Banyak penulis asing yang pernah singgah di Aceh, seperti Fahian dari China tahun 413, I. Tsung tahun 51 H/671 M. Ma Hoa serta Sampo Kong atau Tjeng Ho tahun 818 H/ 1416 M. Mereka singgah di Aru, Perlak, Samudra, Nago, Litoy (Pidie), Lamuri dan Lampoli. Begitu juga dengan Zahid dalam tahun 82 H/717 M., dan Qaswini pada tahun 668 H/1270 M., keduanya berasal dari Persi. Dari Arab, Idresi seorang pakar ilmu bumi pun telah singgah di sana pada 552 H/1157 M. Ibnu Khordabeh pada 231 H/846 M., dan Sulaiman datang sekitar 237 H/851 M. Merekalah yang pernah menyebut namanama negeri di Aceh zaman dulu seperti Poli, Indrapuri, Lam Oli, Indrapatra, Lamuri, Indrapurba, Pantjur, Nedj, Pulu Putu, Dagoroin, Litay, Basma, Perloc, Aramiah (mungkin Al Rami), Tamiang dan Haru.³⁰ Kedatangan mereka dikabarkan dalam rangka berdagang dan berdakwah. Kebanyakan pendaatang-pendatang Arab yang mengunjungi Aceh saat itu mempunyai dua misi yaitu misi dagang dan misi penyebaran agama Islam. Hubungan dagang yang berlangsung antara orang-orang Muslim dari Arab dengan masyarakat tempatan di Aceh melalui Selat Melaka dari hari ke hari semakin erat dan maju. Islam pun berkembang pesat hingga akhirnya pada abad ke-13 M. terbentuklah perkampungan masyarakat Muslim di pesisir Samudra yang jaraknya lebih kurang 15 km dari kota Lhokseumawe. Fakta ini terungkap dari penemuan nisan Malik al-Saleh (wafat 696 H/1297 M), yang diperkuat oleh berita kedatangan Marco Polo ke Perlak tahun 1292 M yang menyebutkan bahwa di sana telah ada raja dan rakyat Islam, serta sumber-sumber hikayat lainnya seperti hikayat Raja-raja Pasai dan sejarah Melayu, menunjukkan kita bahwa di sana telah ada sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang raja Muslim.⁹

⁷ Ali Akbar, *Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*, (Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara, 1990), hlm.1. Lihat juga: Hasanuddin Yusuf Adan, *Konsep Mujarab Membangun Aceh, kertas kerja disampaikan pada Forum Usrah Tanoh Rincong Students Association (TARSA) Malaysia*, Petaling Jaya 26 September 1999.

⁸ Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, terj. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1979), hlm. 317. Lihat juga: Tim Sejarah Aceh Timur, Makalah Seminar: *Masuknya Islam di Peureulak Aceh Timur dan Perkembangannya*, Aceh Timur 25-30 September 1980, hlm. 4

⁹ Uka Tjandrasasmita, *Proses kedatangan Islam dan munculnya kerajaankerajaan Islam di Aceh*, Dalam: Sinar Darussalam No.112 & 113, Banda Aceh, hlm. 5

Osman Ralibi menggambarkan bahwa susah untuk memastikan tanggal awal Islam bertapak di Aceh. Akan tetapi beliau memperkirakan Islam telah dibawa oleh para pedagang yang sekaligus para da'i dari benua Arab ke sana pada awal abad pertama hijrah. Pada awal abad ketujuh masehi perdagangan dengan China melalui Ceylon sudah mempengaruhi benua Asia, pada pertengahan abad kedelapan masehi pedagang-pedagang Muslim Arab ramai terdapat di Canton. Sementara dalam abad sepuluh hingga abad lima belas kedatangan Portugis ke Aceh telah memperselisihkan perdagangannya di timur dan Asia Tenggara.¹⁰

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Islam pertama masuk ke kepulauan Melayu adalah di bumi Aceh yang bergelar Serambi Makkah. Suasana meriah terus wujud dengan berkembangnya Islam hampir merata ke seluruh pelosok tanah Melayu. Pada abad keenam belas dan ketujuh belas hampir seluruh kepulauan Melayu menerima agama Islam. Hasil dari gerakan dakwah di rantau ini maka muncullah beberapa kerajaan Islam yang kuat di Alam Melayu seperti kerajaan Samudera Pasai, Melaka, Aceh, Johor, Riau, Pattani dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan Islam yang telah didirikan itu selain memainkan peranan yang aktif dalam bidang politik dan perdagangan juga turut menjadi pusat-pusat kebudayaan Melayu Islam.

Selain kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Pasai pun menjadi satu sumber awal berkembangnya Islam di Nusantara. Hal ini ditandai dengan sebuah kunjungan Ibnu Batutah (1345) ke sana. Beliau mengisahkan bahwa raja Samudera, al-Malik al-Zahir memiliki budi pekerti yang sangat baik serta mempunyai belas kasihan kepada para fakir miskin. Ketika melaksanakan shalat Jum'at beliau senantiasa berjalan kaki ke masjid, dan raja beserta rakyatnya bermazhab Syafi'i. Islam masuk ke Pasai langsung dari negeri Arab. Hal ini dibuktikan dengan semua rakyat termasuk raja di sana bermazhab Syafi'i. Sementara di India mereka mengikuti mazhab Hanafi. Demikian pula halnya dengan gelar yang dipakai raja-raja Pasai di kala itu dengan sebutan al-Malik sebagaimana lazimnya gelar bagi raja-raja Mesir dan Arab. Sedangkan di India dan Iran yang bermazhab Syi'ah mereka memakai gelar Syah seperti Syah Reza Pahlevi atau Syah Iran. Terdapat batu-batu nisan buatan India di sana adalah hasil belian raja-raja Pasai karena nisan India bagus kualitasnya, dan perkara ini tidak menunjukkan bahwa Islam di sana berasal dari India.

Perkembangan Islam di Perlak dan Samudera Pasai ternyata bukan hanya berkisar di wilayah Aceh saja, sebaliknya ia telah berkembang luas sampai ke beberapa pulau lain di sekitarnya. Dikabarkan Islam dari Aceh telah melewati Selat Melaka sehingga sampai ke Malaysia, Pattani (Thailand), Brunei Darussalam dan Filipina. Di Thailand Islam dibawa oleh Syaikh Said dari Pasai, hal ini dibuktikan oleh sebuah makam yang oleh masyarakat di sana dikenai dengan nama Makam Tok Pasai. Sementara agama Islam di Brunei Darussalam dan Filipina juga dibawa oleh pendakwah dari Pasai, yang bernama Syaikh Syarif Kasim dan Syaikh Abu Bakar.

¹⁰ Osman Raliby, *Atjeh, its History and Cultural*", Sinar Darussalam No.10, Banda Aceh, hlm.

¹¹Dari Pasai agama Islam terus meluas pengaruhnya dan bertambah ramai pemeluknya sampai ke pulau Jawa. Penyebaran Islam ke tanah Jawa juga dilakukan oleh muballigh dari Pasai yang bernama Fatahillah (Falatehan), yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau lahir di Pasai dalam tahun 1490, kemudian menuntut ilmu ke Arab dan sekembalinya dari sana beliau menuju Banten untuk membantu kerajaan Demak mengalahkan Sunda Kelapa, seterusnya beliau mendirikan kota Jayakarta.¹²

Kedudukan manusia dan kebudayaan di bumi Aceh senantiasa menyatu antara satu dengan lainnya. Sebelum Islam datang ke Aceh orang-orang di sana dengan baiknya tunduk dan patuh kepada ajaran agama Hindu dan Budha yang menjadi kepercayaan mereka. Sebaliknya setelah Islam datang sampai hari ini hampir seratus persen bangsa Aceh menerimanya dan mengamalkan dalam kehidupan mereka secara sempurna sehingga sulit dipisahkan antara Aceh dengan Islam, demikian menyatunya Islam dengan Aceh dan bangsanya. Penyatuan ini disifatkan oleh para pakar sejarah Aceh sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan di antara keduanya. Karena keadaan yang demikian dekat maka mereka menukulkannya sebagai hukum Islam di satu sisi dan adat Aceh di sisi lain, keduanya senantiasa menyatu dan tak boleh dipisahkan sampai kapanpun. Hadih maja⁵² menglikiskan suasana ini sebagai Hukôm ngön adat laee zat ngön sifeuet (hukum dengan adat seperti zat dengan sifat).

Sebagaimana telah kita terangkan di belakang bahwa Islam pertama bertapak adalah di Perlak (sekarang Peureulak), Aceh Timur. Dari sinilah Islam dan kebudayaan Islam itu bermula serta menyebar keseluruh tanah Melayu dengan berbagai aktivitas yang dijalankan ummatnya. Ummat Islam di masa itu dengan mudah saja dapat menerima dan menyatu dengan Islam serta budaya yang dibawa Islam itu sendiri. Keadaan ini sangatlah berbeda dengan kondisi dan situasi masyarakat pulau Jawa yang lebih memilih Hindu dan lari ke pulau Bali ketika Islam dibawa Falatehan dari Pasai ke sana.

Di Kedah, Aceh (saat ini sudah menjadi bagian dari Malaysia) muncul pula sebuah mitos yang menyebut bahwa Islam di wilayah tersebut dimungkinkan tersebar luas karena peran dari Syekh Abdullah Yamani yang berhasil membujuk Raja Phra Ong Mahawangsa untuk masuk Islam. Syekh Abdullah Yamani adalah murid dari Syekh Abdullah Baghdad yang konon merupakan seorang aulia yang mustajab dan makbul segala doanya. Syekh Abdullah Yamani sangat pandai membaca Qur'an dan tafsir. Pada suatu hari, Syekh Abdullah Yamani singgah di istana Raja Phra Ong Mahawangsa. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan raja setelah terlibat dalam sebuah insiden dengan penghulu setan. Setelah menceritakan semua yang dialami termasuk tentang siapa dirinya, Syekh Abdullah Yamani mengajak Raja Phra

¹¹ Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, hlm. 8

¹² Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam* (Cet. I; Banda Aceh: Nasa, 2013), h. 24-34

Ong Mahawangsa masuk Islam. Seketika, Raja menyetujui ajakan Syekh Abdullah Yamani untuk masuk Islam yang selanjutnya diikuti oleh istri dan para pengikutnya. Tercatat, Raja Phra Ong Mahawangsa merupakan raja Kedah pertama yang memeluk Islam dan dikemudian hari mengganti namanya menjadi Sultan Mudzaffar Syah. Sejak itu, Syekh Abdullah Yamani menjadi pengajar al-Qur'an dan segala hal yang terkait dengan rukun Islam bagi masyarakat setempat. Maka tersebarlah berita keislaman Raja ke seluruh penjuru wilayah Kedah sehingga berbondong-bondong masyarakat memeluk Islam sebagai agama mereka. Setelah berhasil mengislamkan wilayah Kedah, Syekh Abdullah Yamani kembali ke Baghdad.¹³

Salah satu kerajaan Islam terkemuka di belahan barat Nusantara, tepatnya di Sumatra, adalah kerajaan Aceh, yang mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan 17. Aceh, yang sebelumnya hanya terbatas sebagai pusat perdagangan berskala kecil, seperti halnya pusat-pusat dagang lain di belahan utara Sumatra segera berkembang pesat setelah terlibat secara langsung dalam perdagangan maritim internasional. Sejak penaklukan Malaka, para pedagang Muslim manca negara yang sebelumnya melakukan transaksi bisnis mereka di Malaka beralih ke Aceh.

Sultan Ali Mughayat Shah (w. 1530) adalah orang yang selama ini dianggap telah bertanggung jawab meletakkan landasan yang real bagi berdirinya kerajaan Aceh. Selama masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan Aceh tidak hanya terbatas di lembah sungai Aceh, yang kemudian dikenal dengan Aceh Besar, tapi sudah menjangkau beberapa wilayah lain di sekitarnya. Pada 1520 dia menaklukkan Daya di ujung barat, dan selanjutnya Pidie dan Pasai di belahan timur pada masing-masing 1521 dan 1524.

Ali Mughayat Shah dalam hal ini telah meletakkan landasan kokoh bagi berkembangnya kerajaan Aceh di tangan para penggantinya kemudian, sehingga kerajaan tersebut muncul sebagai satu kekuatan Islam terkemuka di Nusantara. Menyangkut proses pembentukannya menjadi sebuah kerajaan, penting ditekankan bahwa wilayah kerajaan Aceh memang sangat potensial sebagai penghasil barang-barang komoditi yang laku di pasaran internasional. Daerah-daerah taklukan Ali Mughayat Shah di atas khususnya Pidie, Pasai dan Daya terkenal sebagai penghasil utama lada dan rempah-rempah di Sumatra. Maka penguasaan atas daerah-daerah tersebut menjadi sangat strategis bagi perkembangan kerajaan. Tidak saja di bidang ekonomi perdagangan, bahwa daerah-daerah tersebut menjadi pemasok kebutuhan para pedagang internasional yang banyak berkunjung ke kerajaan. Melainkan, pada gilirannya, penguasaan wilayah tersebut secara politik juga sangat signifikan bagi upaya konsolidasi kekuatan politik oleh para penguasa kerajaan Aceh. Hal terakhir ini terutama berlangsung pada masa kekuasaan raja-raja Aceh berikutnya, yang seperti akan dibahas secara rinci kemudian berhasil membawa kerajaan tersebut

¹³ Abduh Hadi WM dan Azymardi Azra, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*, (Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta, 2015), h. 102-103.

sebagai pemegang kontrol politik dan ekonomi yang dominan di kawasan barat Nusantara. Bersamaan dengan kerajaan Aceh, di belahan barat Nusantara juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam sejalan arus perdagangan maritim setelah kejatuhan Malaka. Salah satu yang terpenting, dan kerap menjadi kekuatan tandingan kerajaan Aceh, adalah kerajaan Johor di belahan selatan Sumatra.¹⁴

B. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Aceh

Sejalan perannya sebagai basis politik Islamisasi—dan disusul berdirinya lembaga-lembaga Islam di Nusantara pada saat yang sama juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam. Proses Islamisasi di Nusantara, yang berlangsung sejalan dengan dinamika politik dan perkembangan ekonomi, selanjutnya membawa kerajaan-kerajaan sebagai pusat kekuasaan sekaligus menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan Islam. Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14 adalah contoh paling tepat untuk diangkat. Catatan seorang pengembara dari Afrika, Ibnu Batuttah, seperti telah dikutip sebelumnya menunjukkan dengan jelas bahwa kegiatan kajian tentang Islam, khususnya menyangkut hukum-hukum Islam, dilakukan di istana kerajaan yang sepenuhnya didukung penguasa Samudra Pasai, Sultan Malik al-Zahir. Bahkan, lebih dari itu, Samudra Pasai juga dikunjungi banyak ulama dari negara-negara Islam yang berperan sebagai tenaga pengajar di lingkungan kerajaan. Mengikuti Ibnu Batuttah, tercatat beberapa nama, seperti al-Qadi al-Sharif al-Shirazi dari Persia, Taj al-Din al-Isfahani dari Isfahan, dan Amir al-Dawlasah dari India. Karena itu, di Nusantara, Samudra Pasai telah diakui sebagai pusat pendidikan Islam terkemuka, dan menarik banyak kalangan masyarakat berkunjung untuk belajar Islam. Salah seorang yang tercatat pernah menuntut ilmu di kerajaan tersebut adalah Nur al-Din Ibrahim Mawlana Izra'il, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati salah seorang “wali sembilan” yang berperan penting dalam proses Islamisasi di Jawa, serta peletak dasar berdirinya kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Di kerajaan Samudra Pasai, dan juga berlanjut di kerajaan Malaka, pelaksanaan pendidikan Islam sejauh data sejarah yang tersedia nampaknya masih terbatas di lingkungan istana kerajaan, setidaknya belum terlembaga dalam sebuah institusi yang sengaja dirancang khusus untuk tujuan demikian. Baru di kerajaan Aceh khususnya sejak masa Sultan Iskandar Muda pendidikan Islam diselenggarakan di sebuah lembaga khusus yang disebut “meunasah”, “rangkang”, atau “dayah”. Meunasah awalnya lebih merupakan tempat ibadat yang kemudian berfungsi sebagai tempat pendidikan awal bagi anak-anak masyarakat Aceh untuk belajar membaca al-Qur'an. Setelah di meunasah, mereka, atau murid, melanjutkan pendidikan agamanya ke tingkat lebih tinggi di rangkang, yang biasanya didirikan di lingkungan mesjid. Jenjang pendidikan kemudian berlanjut di dayah, sebuah lembaga pendidikan Islam bagi mereka yang bermaksud mendalami ilmu agama Islam. Berbeda dengan rangkang yang masih berada di

¹⁴Abduh Hadi WM dan Azymardi Azra, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*, (Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta, 2015), h. 181.

lingkungan mesjid, dayah berdiri sendiri sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan yang terpisah dari lingkungan mesjid. Dalam perkembangannya kemudian, dayah menyelenggarakan pendidikan dengan penekanan khusus di bidang-bidang tertentu dalam ilmu keislaman tradisional. Maka dikenal, misalnya, dayah tafsir untuk bidang tafsir al-Qur'an, dayah fiqh untuk mendalami hukum Islam, dan demikian seterusnya. Salah satu desain pendidikan Islam di Indonesia khususnya di Aceh yaitu Dayah. Dayah merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang mempunyai beberapa unsur pokok yaitu sebagai pendukungnya, seperti pondok tempat pengajian, dan pondok tempat penginapan mempunyai salah satu elemen pokok dari Dayah, menjadi ciri khas tradisi Dayah sehingga membedakan Dayah dengan sistem pendidikan formal sekolah atau madrasah yang di dirikan oleh pemerintah.

Sumber lain menyebutkan Dayah juga merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Aceh mengajarkan ilmu-ilmu keislaman pada era kemerdekaan. Lembaga pendidikan tersebut sampai sekarang masih banyak peminatnya dikalangan masyarakat. Program pengajarannya dilakukan di balai tempat yang tergolong sederhana, karena hanya memanfaatkan balai tempat belajar, tidak dalam bentuk ruangan sebagaimana layaknya pendidikan formal seperti SD, SMP atau madrasah lainnya. Kesederhanaan tempat aktifitas belajar-mengajar ini tidak berarti lembaga pendidikan dayah kurang bermutu atau ketinggalan zaman, tetapi sebaliknya dari lembaga pendidikan Dayah dan Balai pengajianlah generasi bangsa berprestasi dilahirkan, karna menguasai ilmu dunia dan akhirat.¹⁵

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Aceh, setara dengan pesantren di Jawa dan surau di Minangkabau, memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosialkeagamaan dan budaya masyarakat Aceh sebagai Serambi Mekkah. Di dayah, santri merupakan peserta didik atau pelajar yang dipersiapkan oleh pengasuh dayah sebagai kader ulama, kader bangsa yang pada gilirannya akan menjadi tokoh masyarakat bangsa. Pada era otonomi daerah sekarang ini keberadaan dayah merupakan elemen yang penting dalam proses pembangunan sosial. Berdasarkan statusnya, lembaga dayah dapat menjadi milik perorangan atau yayasan, kedua status dayah memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Dayah milik pribadi Tengku/kyai memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibanding dengan dayah yang dikelola oleh yayasan. Dayah milik pribadi lebih menonjolkan tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai absolute dayah dengan tengku sebagai sumber kepatuhan, pimpinan spiritual dan tokoh kunci dayah. Sedangkan dayah milik yayasan lebih memperhatikan manajemen dengan adanya pembagian tugas berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Kemampuan dayah bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, tetapi juga mengadakan perubahan sosial dan masyarakat. Pengaruh dayah dapat terlihat pada kehidupan santri dan alumninya serta kehidupan masyarakat sekitarnya.

¹⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Mentang Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh; Yayasan PeNA, 2008), hal, 41

Secara garis besar bentuk pendidikan dayah dibagi atas tiga macam yaitu:

1. Dayah Salafiah: dayah yang masih mempertahankan system salafiahnya, baik kurikulum maupun system pengajarannya. Dayah ini mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dari kitab-kitab kuning berdasarkan mazhab tertentu.
2. Dayah Terpadu: dayah yang memadukan kurikulum salafiah dan kurikulum umum dibawah binaan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Nasional serta tidak menghilangkan kurikulum lama yang salafiyah.¹⁶
3. Dayah Modern: dayah yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik madrasah (MI, MTs, MA dan PT Agama Islam), maupun sekolah umum (SD, SMP, SMU dan PT umum).

Berdasarkan hasil penelitian Moh. Natsir dkk. Dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman bahwa Dayah memilih manajemen yang terstruktur seperti penjelasan berikut ini:

1. Penguatan perencanaan manajemen Dayah melalui penyusunan rencana kerja dinas. program ini dimaksudkan memberikan pengetahuan manajerial kepada para tengku-tengku pimpinan dayah dalam pengelolaan pendidikan dayah, manajerial keuangan dayah dan administrasi dayah. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi kegiatan pelatihan manajemen dayah, kegiatan pelatihan pengembangan silabus dan kurikulum dayah, kegiatan legalisasi dan sertifikasi kepemilikan tanah dayah, kegiatan pelatihan aset manajemen dayah, kegiatan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan dayah, kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah, kegiatan bantuan modal pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kegiatan pelatihan sistem peratur santri.¹⁷
2. Membuat program-program dalam bentuk pelatihan bagi pimpinan, guru dan santri Dayah. Pembangunan fasilitas dayah dan kesejahteraan guru-guru dayah pun mulai terasa sejak hadirnya instansi kebanggaan rakyat aceh ini. Mereka memfasilitasi sejumlah pembangunan dayah, mensejahterakan guru-gurunya dengan penyaluran insentif guru berdasarkan akreditasi dayah masing-masing mulai dari balai pengajian dayah salafi maupun dayah modern (terpadu). Itulah salah satu hadiah terbesar masyarakat aceh setelah dilanda konflik berkepanjangan. Semoga badan dayah selalu konsisten menjadi garda terdepan pendidikan dayah di Aceh, menjadi rumah besar lembaga tertua di indonesia yang telah melahirkan banyak alim ulama di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya.¹⁸
3. Program-program kegiatan bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme pimpinan, guru atau santri Dayah.

¹⁶ <https://www.scribd.com/doc/177631358/MANAJEMEN-DAYAH>

¹⁷ A. Samad Usman dan Abd. Hadi, *Manajemen Lembaga Pendidikan Dayah*, Jurnal Intektualita UIN Ar-Raniry Vol. 10. No. 2 Tahun 2021, h. 19.

¹⁸ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*. (Cet. I; Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan NAD. 2009), h. 234.

4. Pihak dinas melakukan pengawasan terhadap program yang berjalan.¹⁹

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam klasik di bumi Aceh, memiliki sejarah unik dalam mengembangkan pendidikan Islam di tanah air. Mayoritas masyarakat pernah mengecap pendidikan dayah sejak masa pendidikan anak usia dini sampai usia lanjut, karena pendidikan dayah tetap relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat melenial, kini dayah melakukan inovasi kelembagaan yang dulunya semata-mata melaksanakan pendidikan sistem dayah tradisional. Dayah kini mendirikan dan melaksanakan pendidikan formal dengan berbagai jenjang dari pendidikan anak usia dini, menengah, kejuruan (umum) sampai dengan perguruan tinggi (Ma'had 'Aly).

Penelitian ini mencoba melihat inovasi kurikulum dayah di Aceh, pemenuhan dayah terhadap standar nasional pendidikan dan kendala-kendala dayah dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridisakreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM). Hasil penelitian bahwa inovasi kurikulum dayah belum dilakukan kecuali inovasi sistem kelembagaan yang ditambah dengan pendidikan formal dengan berbagai jenjang. Pemenuhan standar nasional pendidikan dayah bahwa sebagian kecil dayah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, sedangkan sebagai besarnya belum memenuhi beberapa indikator dari delapan standar yang ditetapkan. Sedangkan kendala dayah dalam memenuhi standar nasional pendidikan di antaranya kelemahan pada sumber daya manusia, kelemahan bidang lembaga dalam mengelola dana pembiayaan dan pelaporan kendala terakhir lemahnya bidang pengembangan, penyediaan, dan manajemen administrasi dan dokumentasi sekolah²⁰

1. Pendidikan Dayah Priode Awal Aceh

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan Nusantara. Ia telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya ajaran Islam di Aceh. Marhamah: Pendidikan Dayah Dan Perkembangannya Di Aceh | 73 Dayah juga telah banyak memberikan andil dalam perkembangan dan kemajuan Aceh. Melalui Dayah, nilai-nilai keacehan dan keislaman diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum Belanda datang ke Indonesia dayah merupakan pusat pengembangan dan pembinaan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan penyebaran agama dan mempunyai peranan tertentu. Setelah Belanda berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, Dayah menjadi pusat perlawanan pertahanan terhadap kekuasaan Belanda. Dayah berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat dan sebagai pusat untuk melawan para penjajah. Pendidikan yang berjalan di Aceh sebelum diperangi Belanda adalah pendidikan berdasarkan agama

¹⁹ Mohd. Nasir, dkk. 2018. *Narasi Pendidikan Islam di Aceh: Biografi Intelektual M. Arifin Amin*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 42 No. 2.

²⁰ Zulfikar Ali Buto Siregar dan Hafifuddin, *Inovasi Kurikulum Dayah Memenuhi Standar dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Aceh*

Islam, sebab Aceh kala itu adalah daerah kerajaan Islam. Pendidikan bercorak Islami ini berlaku untuk seluruh negeri ketika itu. Anakanak dididik di rumah-rumah, di masjid atau di meunasah (Mukhlisuddin, 2012). Tempat belajar bagi masyarakat secara umum adalah dayah. Pendidikan dayah pada saat ini dimulai dari tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Belajar tingkat rendah dan menengah dilakukan di rumah atau di meunasah, di ajarkan oleh santri yang sudah tinggi ilmunya (teungku rangkang). Sementara teungku rangkang itu belajar bersama teungku Chik (Ulama Besar/pimpinan Dayah). Sedangkan tingkat tinggi dilakukan dengan mengundang seorang teungku atau ulama untuk mengajar di rumah, bahkan pada tingkat khusus dalam cabang pengetahuan Lebih lanjut Hasbi Amiruddin menyatakan bahwa pendidikan dayah dimasa kesultanan, mengalami kemajuan pesat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dayah terus berkembang, jumlah ulama (tenaga pengajar) terus tumbuh (bertambah), sultan mengundang ulama luar negeri, baik untuk kepentingan mengajar dan kepentingan kerajaan sebagai konsultan dibidang hukum Islam. Sebagian ulama Aceh ikut memperdalam ilmunya dengan memilih tempat ke Makkah dan Madinah. Bukti lainnya adalah terdapat sejumlah kitab-kitab hasil karya ulama Aceh bereputasi internasional seperti pemikiran Hamzah Fansuri, Syamsuddin al Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry dan Abdurrauf al-Singkili yang telah memberi warna pemikiran Islam di Asia Tenggara sejak abad 16-17 bahkan sampai sekarang.²¹

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dayah

Berbicara tentang fungsi dayah, berhubungan erat dengan tujuan pendidikan dayah/pondok pesantren, yaitu menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam (bertafaquh fi al-din) bidang akhlak yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama, mendakwahkan dan menyebarkan agama Islam, menjadi 76 | *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* Volume 10, No. 1, Juni 2018 benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak, meningkatkan pengembangan masyarakat di berbagai sector, menjadi sentral pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat (Tri Qurnati, 2007).

Mok Soon Sang. (2010) Pendidikan menurut Islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan beramal ikhlas. Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka fungsi dayah adalah sebagai berikut: sebagai tempat mendalami ajaran Islam, sebagai tempat menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat, sebagai pencetak manusia berakhlak mulia dan sebagai tempat pengkaderan pengembangan masyarakat di berbagai sector. Secara umum tujuan pendidikan dayah merupakan bahagian dari tujuan pendidikan nasional, sebab pendidikan dayah ikut bertanggungjawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Maka tujuan pendidikan dayah adalah: mencetak insan-insan muslim

²¹Marhamah, *Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh, Buku Pendidikan Islam* Tahun 2022, h. 73.

yang menjadi pendukung ajaranajaran Allah secara utuh” (Mefred Oepen dan Wolfgang Karcher, 1980). Merujuk pada Al-Quran dan hadits, maka dasar utama dari tujuan pendidikan Dayah adalah diarahkan untuk ahli-ahli agama dan ulama yang menguasai ilmu agama serta mengamalkannya dengan tekun untuk berbakti dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat/: 56.²²

3. Kurikulum pendidikan diyah

Menurut Zulkhairi (2016) kurikulum memiliki peranan sangat penting pada suatu lembaga pendidikan. Ia menyimpulkan dalam tiga peranan yaitu. 1. Peranan konservatif yaitu kurikulum yang kembangkan untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan standar nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat. 2. Peranan kritis atau evaluatif adalah kurikulum berperanan sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan dan aktif berpartisipasi dalam melakukan kontrol sosial dan memberi penekanan pada pola berfikir kritis. Peranan ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang didasarkan pada pandangan filosofi progresivisme. 3. Peranan kreatif adalah kurikulum untuk membangun kehidupan, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif serta berbagai rencana pengembangan.

Sebagaimana pengakuan para ulama dayah dalam buku Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh bahwa tidak ada suatu kurikulum yang menjadi ketentuan pusat sebagai rujukan dan tolak ukur semua lembaga pendidikan dayah di Aceh. Kurikulum yang dikembangkan di Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh {85 dayah hanya tergantung kepada keinginan dan kemampuan para pimpinannya. Kendati demikian, secara umum terdapat persamaan tentang mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada para santri, misalnya pengetahuan hukum Islam (ilmu fiqh), tata bahasa (Ilmu Nahu Saraf), Tauhid dan Tafsir. Untuk mata pelajaran Ilmu Fiqh, rata-rata dayah saat ini mengajarkan kitab-kitab: Matan Taqrib, al-Bajurial-Syarah, Fathal Wahab, al-Mahalli dan Tuhfatul Muhtaj. Dalm bidang ilmu Saraf, kitab-kitab yang diajarkan antara lain Dammunwaal-Madkhal, al-Kailani dan al-Matlub. Dalam Ilmu Nahwu, mata pelajaran yang diajarkan antara lain adalah Matnal Jarumiyah, al-Kawakib dan al-Khudari. Dalam pelajaran Tafsir al-Quran kitab pegangannya adalah Tafsir Djalalain, Khazain, Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Abbas. Dalam pelajaran Hadits yang diajarkan adalah Matan Arba`in, Majalial-Sanniyah, Abi Jamarah dan Fathal-Mubdi. Semua kitab atau mata pelajaran di atas diajarkan atas kemampuan guru (teungku beut) di sebuah dayah. Ada dayah yang kemampuan gurunya bisa mengajari para santri hingga ke tingkat mata pelajaran atau kitab

²²Marhamah, *Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh, Buku Pendidikan Islam* Tahun 2022, h. 76.

Tuhfatul Muhtaj, namun ada juga yang hanya sampai hingga di mata pelajaran Fathul Wahab. Adapun mata pelajaran pelengkap seperti Ilmu Manthiq (logika), Ilmu Ushul Fiqh (tata hukum), Balaghah, `Aruth dan lain sebagainya, tidak ada persamaan dalam pegangannya, bahkan ada di antara dayah-dayah yang tidak mengajarkan sebagian daripada berbagai macam mata pelajaran tersebut. Kurikulum pendidikan dayah menurut para ahli paling tidak memiliki beberapa komponen, antara lain tujuan isi pengetahuan dan pengalaman belajar, strategi dan evaluasi. Biasa komponen tujuan tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan yakni tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Namun demikian berbagai tingkat tujuan tersebut satu sama lain merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.²³

4. Pendidikan Dayah Periode Modern

Pada awal kemerdekaan Indonesia (1945-1948), para pemimpin dan ulama Aceh telah sepakat dalam mobilisasi massa untuk mempertahankan tanah air seluruh madrasah diserahkan dibawah control negara, sedangkan dayah tetap dibawah control para ulama. Kedua lembaga ini berjalan masing-masing atau secara terpisah. Pada tahun 1953, terjadinya perselisihan antara Aceh dengan pemerintah pusat, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Hal ini berakibat pada madrasah yang sebagai tempat mendalami ajaran Islam, sebagai tempat menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat, sebagai pencetak manusia berakhlak mulia dan sebagai tempat pengkaderan pengembangan masyarakat di berbagai sector. Sudah didirikan, namun tidak dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan dayah di Aceh berjalan sebagaimana yang telah ada sebelumnya dan masih eksis sampai sekarang dengan memfokuskan diri pada materi-materi Islam tradisional saja (M. Hasbi Amiruddin, 2013). Sejak tahun 1980-an, ada beberapa hal yang dilakukan oleh para intelektual baik yang berasal dari dayah atau sekolah, untuk mengubah sistem dan kurikulum dayah, untuk menjadikan lembaga ini sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Dengan begitu, dayah-dayah tersebut dijadikan sebagai dayah terpadu (integrated dayah). Dari segi kurikulum dan system mengajar, mereka mengikuti system madrasah. Kurikulum madrasah diajarkan pada pagi hari, sedangkan di sore hari, ditetapkan kurikulum dan sistem dayah. Para murid diharuskan untuk tinggal di asrama, sebagaimana yang ditetapkan pada dayah-dayah tradisional. Namun dari segi materi yang diajarkan, dayah terpadu tidak mengajarkan kitab-kitab yang lebih tinggi (advanced texts). Terkait dengan problema pendidikan pesantren dalam interaksinya dengan perubahan sosial akibat modernisasi atau globalisasi, kalangan internal pesantren sebenarnya telah melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model pendidikan formal (sekolah), mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, di lingkungan pesantren dengan menawarkan perpaduan kurikulum keagamaan dan umum serta perangkat

²³ Nurainia, *Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh*, Jurnal Serambi Tarbawi, Vol. 9 No.1 Tahun 2021, h. 85.

ketrampilan teknologis yang direncanakan secara sistematis-integralistik. Tawaran berbagai model pendidikan mulai dari Sekolah Dasar unggulan, Sekolah Lanjutan Menengah Pertama, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Di dayah tradisional, ada beberapa kitab standar yang diajarkan, seperti: al-Bajuri, al-Mahalli, Nihayah al-Muhtaj, al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang tasawuf Ihya 'Ulum al-Din, dan al-Sanusi dalam teologi. Kitab-kitab ini tidak diajarkan di Dayah terpadu. Tidak diajarkan bukan berarti tidak adanya tenaga ahli sebagai pengajar, akan tetapi tidak cukup waktu untuk belajar secara intensif seperti di dayah salafi.²⁴

Di mana dunia dayah (pesantren) sudah memperkenalkan sebuah kaidah yang sangat jitu, yaitu suatu ungkapan: "al-muhafadzah 'ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah" (membina budaya-budaya klasik yang baik dan terus menggali budaya-budaya baru yang lebih konstruktif).²⁵ Kaidah di atas merupakan legalitas yang kuat atas segala upaya rekonstruksi. Kebebasan membentuk model dayah (pesantren) merupakan keniscayaan, asalkan tidak terlepas dari frame al-ashlah (lebih baik). Begitu pula, ketika dunia dayah (pesantren) diharuskan mengadakan perubahan sebagai konsekuensi dari kemajuan dunia modern, maka aspek al-ashlah menjadi kata kunci yang harus dipegang. Dayah modern, berarti dayah yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, selalu mengutamakan prinsip efektifitas dan efisiensi dan sejenisnya. Oleh karena itu, dewasa ini dayah mulai menampakkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mumpuni, yaitu di dalamnya didirikan sekolah baik secara formal maupun nonformal.²⁶

Penting dijelaskan bahwa pendidikan di kerajaan Aceh ini seperti dicatat Azyumardi Azra, seorang sarjana sejarah Islam di IAIN banyak dilakukan oleh para ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Ini tentu sejalan dengan berita dalam Bustan as-Salatin – karangan Nuruddin ar-Raniri, seorang ulama terkemuka di Aceh abad ke-17 – yang mencatat kehadiran para ulama di kerajaan Aceh yang memberi pelajaran di berbagai bidang ilmu keislaman: seperti tafsir, fiqh, tasawuf, dan sebagainya. Para ulama tersebut datang ke kerajaan Aceh yang memang sudah sedemikian terintegrasi ke dalam dunia Islam (dar al-Islam) tingkat internasional. Baru pada tahap perkembangannya lebih kemudian, pendidikan Islam sepenuhnya dilakukan para ulama Aceh sendiri, yang umumnya disebut "teungku" sebuah gelar kehormatan karena tingkat pengetahuan keislaman mereka yang lebih tinggi. Sejalan berkembangnya Aceh sebagai pusat kekuasaan Islam terkemuka di Nusantara pada

²⁴Marhamah, *Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh, Buku Pendidikan Islam* Tahun 2022, h. 85-86.

²⁵Mashuri, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Daya*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, 2013, Vol. XIII No. 2. Hal. 263.

²⁶ Mashuri, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Daya*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, 2013, Vol. XIII No. 2. Hal. 264.

abad ke-17, lembaga pendidikan Islam kerajaan di atas selanjutnya menjadi dasar tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam serupa di beberapa wilayah lain di Melayu-Nusantara. Hal ini khususnya dilakukan para ulama yang belajar ke Aceh. Mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan di daerah asal mereka masing-masing.

Demikian di Minangkabau, Sumatra Barat, misalnya, Tuanku Burhanuddin telah diakui sebagai orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan di Ulakan, sebuah kota pantai di Minangkabau, setelah menamatkan studinya di Aceh bersama Abd al-Rauf al-Sinkili seorang ulama terkemuka di Aceh abad ke-17. Lembaga pendidikan tersebut kemudian terkenal disebut "surau" sebuah kata Minangkabau berarti "tempat", atau lebih tepatnya "tempat ibadah". Demikian di dunia Melayu, surau telah berkembang sebagai pusat dilaksanakannya proses pendidikan keislaman seperti halnya meunasah di Aceh.

Lebih dari itu, surau di Ulakan ini selanjutnya diakui memiliki kedudukan penting dalam proses Islamisasi di Minangkabau. Sejalan kharisma Burhanuddin sebagai pendiri surau, dan sekaligus pengikut tarekat Syattariyah, tradisi Minangkabau bahkan kerap menempatkan Ulakan sebagai basis Islamisasi di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, surau Ulakan ini memang telah berperan penting sebagai pusat pendidikan Islam yang banyak dikunjungi Muslim Minangkabau dan seperti halnya Burhanuddin, mereka yang belajar di Ulakan ini juga segera mendirikan lembaga pendidikan serupa di daerah asal mereka masing-masing. Khusus untuk konteks Minangkabau, tercatat misalnya surau Tuanku Nan Tuo di Cangking dan surau Pemansiangan. Keduanya didirikan mengambil model surau yang pertama kali dibangun di Ulakan. Karena itu, seperti di catat kalangan hali sejarah, dari surau Ulakan inilah bahwa mata-rantai tradisi surau sebagai pusat pendidikan keislaman dimulai, dan pula dari sinilah bahwa Islamisasi masyarakat secara intensif berlangsung. Di Minangkabau, surau seperti halnya meunasah di Aceh telah berperan dalam perumusan keislaman masyarakat lokal. Hanya saja, bila di Aceh peran kerajaan nampak sangat dominan termasuk dalam corak pemikiran Islam yang hendak diberlakukan maka di Minangkabau adalah ulama yang nampak bertanggung jawab dalam merumuskan Islam dalam kaitan dengan adat lokal masyarakat.

Demikian kasus gerakan Padri di Minangkabau, misalnya, terbatas melibatkan para ulama yang baru dari Mekkah, dengan program pemurinian keagamaan mereka, melawan kaum adat yang menjadikan Islam lebih kompromis terhadap tradisi lokal yang berlaku. Ini jelas berbeda dengan kasus Aceh, di mana konflik keagamaan antara Hamzah Fansuri yang menekankan pola keberagamaan sufisme phanteistik dan Nuruddin ar-Raniri yang berorientasi shari'ah. Dalam hal ini, penguasa kerajaan justeru muncul menjadi penentu dominan mengatasi konflik keagamaan tersebut.²⁷

²⁷Abduh Hadi WM dan Azymardi Azra, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*, (Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta, 2015), h. 212-214.

Proses pendidikan yang dijalankan dan berlangsung pada tiga pusat pendidikan tersebut harus berkelanjutan (sustainable dan bersinergi. Artinya adanya keharmonisan dan keterkaitan secara kokoh yang sulit dihilangkan dalam “paradigma pendidikan menyeluruh” di keluarga, sekolah dan masyarakat. Keharmonisan dan keberfungsian tiga pilar pendidikan ini akan memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter masyarakat secara umum dan anak didik secara khusus. Namun sebaliknya, apabila ketiga pilar pendidikan ini belum berjalan secara sinergis dan belum berfungsi secara baik, maka akan membawa dampak yang kurang menyenangkan dalam proses pembentukan karakter masyarakat secara umum dan juga peserta didik secara khusus.²⁸

Konsekuensi logis ini dapat dipahami mengingat ke tiga pilar pendidikan itu saling keterkaitan dan sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, kualitas pendidikan anak yang tidak baik dalam keluarga memberi konsekuensi yang kurang baik juga kepada sekolah dan perguruan tinggi serta memperbanyak dan memperpanjang persoalan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang buruk (dihiasi dengan berbagai pelanggaran dan penyakit sosial), juga memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses pentransferan nilai-nilai yang sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah. Pada sisi lain, manakala proses dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah kehancuran tiga pilar pendidikan tersebut, dan semakin jauh konsep pendidikan untuk keseluruhan dapat diwujudkan. Mengingat begitu asasi dan pentingnya tiga pilar pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tidak salah apabila ketiga pusat pendidikan itu dijadikan wadah dalam proses implementasi syariat Islam di Aceh. Artinya penanaman nilai-nilai Islam baik dalam skop yang sempit maupun dalam skala luas menyentuh seluruh aspek pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, mesti diberikan dan ditanamkan kepada seluruh masyarakat Aceh. Secara aplikatif sasaran dan tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila mampu memaksimalkan proses pendidikan berbasis syariat pada ketiga pusat pendidikan; keluarga, sekolah dan masyarakat. Keterpaduan pendidikan berbasis syariat Islam dalam keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan suatu siklus pendidikan dalam satu lingkaran besar yang tidak dapat dinafikan keterpaduan utuh yang sangat kokoh antara satu pilar dengan pilar yang lain.²⁹

C. Tokoh-tokoh dan Ulama Perkembangan Pendidikan Islam di Aceh

Ulama di kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat, hal ini terjadi karena di samping kerajaan yang berpusat di Banda Aceh menjadikan Islam sebagai landasan gerakannya, juga disebabkan adanya perhatian serius dari para raja

²⁸ Mujiburrahman dkk., *Pendidikan Berbasis Syariat Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2016), h. 16.

²⁹ Mujiburrahman dkk., *Pendidikan Berbasis Syariat Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2016), h. 18.

yang berkuasa di Aceh dengan memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya untuk mengendalikan (media control) jalannya pemerintahan yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur serta mendapat ridha Allah swt. Suatu bukti bahwa kerajaan memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan ulama, yaitu ditempatkannya ulama pada posisi teras kerajaan, baik sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Masih segar dalam ingatan bahwa dari sederetan pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Ditiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman sebagai kepala Sagi (Hulubalang Besar), Teuku Umar dan sebagainya³⁰

Tokoh dan ulama pendidikan Islam di Aceh sebagai berikut:

1. M. Arifin Amin

Perkembangan pendidikan Islam di Aceh Timur selalu merujuk pada salah seorang tokoh pendidikan Islam yang telah banyak mendedikasikan dirinya bagi pendidikan Islam. Ironisnya, nama ini tidak pernah direkam dalam lintasan sejarah pendidikan (Islam) Aceh. Tulisan ini menginvestigasi tidak hanya profil dan karya tulis M. Arifin Amin, tetapi juga kontribusi Arifin terhadap perkembangan pendidikan Islam serta faktor yang sangat dimungkinkan lahirnya inisiasi untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi historis Max Weber dengan menggunakan causal analysis untuk menginterpretasikan berbagai faktor yang melahirkan tindakan Arifin terhadap pendidikan Islam di Aceh Timur. Penelitian ini menggali informasi dari informan yang dilakukan melalui indepth interview dan mengumpulkan karya intelektual serta dokumen lembaga-lembaga pendidikan Islam di mana Arifin merupakan tokoh sentral. Penelitian ini menemukan bahwa Arifin tidak hanya terlibat aktif dalam organisasi sosial dan pendidikan, tetapi juga aktif dalam bidang politik dan sejarah.³¹

2. Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang sarat dengan ide-ide mistis. Selain itu aktif menulis karya-karya tentang tasawuf pada paruh ke dua abad ke16. dan menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, disamping juga menguasai bahasa Urdu. 6 Paham tasawuf yang dibawanya adalah Wujudiyah.

Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi, banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer lewat karya-karyanya yang

³⁰ Nurainia, *Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh*, Jurnal Serambi Tarbawi, Vol. 9 No.1 Tahun 2021, h. 80.

³¹ Mohd. Nasir, dkk. *Narasi Pendidikan Islam di Aceh: Biografi Inteketual M. Arifin Amin*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 42 No. 2, 2018.

monumental. Namun mengenai dimana dan kapan persisnya Hamzah lahir, sampai saat ini masih menjadi pertanyaan dan perbedaan pendapat para ahli sejarah. Hal itu disebabkan karena belum terdapat catatan yang pasti tentang hal tersebut. Satu-satunya data yang dapat dihubungkan dengan tempat kelahiran Hamzah adalah Fansur, yang merupakan suatu tempat yang terletak antara Sibolga dan Singkel. Dari sebutan namanya Hamzah Fansuri, yang berarti Hamzah dari Fansur, yang menunjukkan bahwa Hamzah memang berasal dari Fansur yang merupakan pusat pengetahuan Islam lama di Aceh bagian Barat Daya. Hal yang sama dikatakan oleh Francois Valentijn bahwa Hamzah Fansuri seorang penyair Melayu termasyhur yang dilahirkan di Fansur (Barus) sehingga negeri tersebut terkenal dikarenakan syair-syair Melayu gubahannya. Namun menurut Syech Muhammad Naguib AlAttas berpendapat bahwa Hamzah lahir di Syahrawi, Ayuthia Ibukota Siam lama hal ini didasarkan pada syairnya : "Hamzah asalnya Fansuri Mendapat wujud di tanah Syahrawi Beroleh khilafah ilmu yang 'adil Daripada Abdul Qadir Sayid Jailani" Dalam hal ini pada bait ke dua mendapat wujud di tanah Syahrawi dipahami sebagai Hamzah lahir di sana. Namun pendapat L.F. Brekel, Drewes mengatakan bahwa wujud dalam bait kedua itu diartikan bahwa Hamzah hendak mengatakan di syahrawilah dia bertemu dengan Tuhan. Artinya hamzah memulai mempelajari tarekat Wujudiayah. Kontroversi mengenai tempat kelahiran Hamzah seorang ulama besar ini memang tidak akan pernah selesai, karena data yang ada masih dipertentangkan dan belum ada yang akurat, hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan yang dikait-kaitkan dengan karya-karyanya.

Hamzah fansuri diperkirakan hidup dan berkiprah sebelum dan selama pemerintahan Sultan Alaidin Ali Ri'ayatsyah Saidil Mukammil (1588-1604). Kraemer berpendapat bahwa Hamzah hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat syah Al Mukammil sampai masa awal Iskandar Muda, atau paling tidak hingga tahun 1620 M. Kalau kita melihat dari keberadaannya sebagai penulis produktif yang tercermin dari karya-karyanya, tentu Hamzah telah berkiprah sejak pemerintahan Sultan Alauddin bin Sultan Ahmadsyah Perak hingga pada Sultan 7 Ali Ri'ayatsyah Al Mukammil. Hal ini dapat dilihat dalam sajaknya yang menggambarkan hubungan antara Hamzah dengan sultan, dalam syair berikut mengatakan: "Hamba mengikat shair ini, Di bawah hadrat raja yang wali, Pada bait yang lain Hamzah menulis: Syah Alam raja yang adil, Raja Qutub sempurna Kamil, Wali Allah sempurna wasil, Raja 'arif lagi mukammil. Bait-bait ini secara eksplisit memberikan pesan bahwa hubungan antara Hamzah dengan sultan adalah harmonis, bahkan kata Wali Allah dalam syairnya menampakkan bahwa pengakuan dan penghargaan Hamzah kepada sultan sebagai seorang penguasa tertinggi. Bahkan Sultan Alaidin Ali Riayatsyah diberi sebutan dengan wali Allah mengandung implikasi sultan memiliki "otoritas sufistik keagamaan", yang menyiratkan bahwa wali dalam Islam bermakna seorang yang saleh yang dianugerahi kekuatan dan kelebihan yang berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Sedangkan sebutan sufistik yang tertinggi sebagai seorang yang "sempurna atau kamil" dan "almukammil" yang berarti seorang yang sempurna

atau “insan kamil.” (Amirul Hadi, 2010, 74). Hubungan yang harmonis antara Hamzah Fansuri dapat diceritakan juga oleh John Davis ketika mengunjungi Aceh tahun 1599 bahwa ada seorang pemuka agama yang sangat dihormati oleh rakyat dan penguasa beliau sebagai Syaikh al-Islam, pada masa Sultan Al Mukammil.

Paham dan pemikiran tasawuf Hamzah Fansuri yang dibawanya bersama seorang muridnya bernama Syamsuddin Al-Sumatrani adalah paham wujudiyah. Mereka berdua telah memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan praktek keagamaan kaum Muslim Nusantara pada paruh pertama abad ke- 17 M. Ajaran-ajaran mereka sangat dipengaruhi oleh karangan-karangan Ibnu Arabi dan Al-Jilli. Misalnya bahwa alam raya merupakan serangkaian emanasi neo-platonisme, dan menganggap setiap emanasi adalah aspek Tuhan. Tuhan sebagai wujud tunggal yang tiada bandingan dan sekutu menampakkan sifat-sifat kreatifNya melalui ciptaanNya. Pendapatnya ini merujuk pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, ayat 151 yang artinya “Kemanapun kamu memandang akan tampak wajah Allah”. Paham ini menyebabkan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin di tuduh sesat dan menyimpang. Pemikiran mereka akhirnya ditentang oleh ulama-ulama besar Aceh yang datang belakangan, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkili. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain: 1. Syarab al-‘Asyiqin, 2. Asrar al-‘Arifin, 3. Al Muntahi. Syarab al-‘Asyiqi merupakan risalah tasawuf pertama dalam bahasa melayu yang merupakan ringkasan ajaran faham wujudiyah sebagai pengantar memahami ilmu suluk. Di dalamnya diuraikan cara-cara mencapai makrifat dan tahap-tahap ilmu suluk yang terdiri dari syariat, tarekat, hakekat dan makrifat. Asrar al-‘Arifin kitab hamzah yang menguraikan pandangan falsafahnya tentang metafisika dan teologi sufi, dengan cara menafsirkan utaian syair-syair karangannya menggunakan metode hermeneutika sufi (ta’wil).

Sedangkan kitab Muntahi merupakan risalah tasawufnya yang paling ringkas namun padat, yang menguraikan pandangan Hamzah Fansuri mengenai ucapan-ucapan syahat (teofani) sufi yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Misalnya ucapan dari Mansur al-Hallaj “An al- Haqq” (Akulah kebenaran kreatif). Akhir perjalan kiprah Hamzah Fansuri kembali ke Singkil mendirikan dayah atau pesantren dan meninggal di sana. Makamnya terdapat di Desa Oboh, Kecamatan Rangkang, Kabupaten Aceh Singkil. Setelah pemekaran wilayah Desa ini masuk wilayah Kota Subulussalam. Kini makamnya dirawat dan dijaga dengan baik, namun sangat disayangkan kini telah terjadi vandalism (kerusakan) berupa pengecatan pada nisan makam, sehingga menyebabkan hilang nilai historis dan keaslian makam.

3. Syamsudin Al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsudin Pasai

Sebagai penulis risalah tasawuf dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Syamsudin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya, Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsudin sebagai bishop yang berarti seseorang mempunyai

kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari al-Jauhari pengarang kitab Tajul al-Salatin (T. Iskandar, 1987). Dalam penulisan sastra, peranan Syamsudin terutama dalam upayanya mengembangkan kritik sastra secara hermeneutika sufi (ta'wil) yang telah berkembang sejak abad 11 M. Karyanya yang menggunakan metode ta'wil ini tampak dalam risalahnya yaitu Syarah Ruba'I Hamzah Fansuri. Ta'wil merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis (makna lahir, makna bathin, dan makna isyarah atau sugestif).

Bahasa Melayu yang digunakan Syamsudin dalam karyanya tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan penulis kitab sastra dalam abad 17-19 M. Karya-karyanya antara lain adalah: 1. Mir'at al-Mukminin (Cermin orang beriman), 2. Jauhar al-Haqaiq (Permata Kebenaran), 3. Kitab al-Haraka, 4. Mir'at al-Iman, 5. Kitab al-Martaba (Martabat manusia), 6. Mir'at al-Muhaqqiqin, 7. Syarah Ruba'I Hamzah fansuri, 8. Thariq al-Salihin, dan lain-lain. Ajaran yang dibawa Syamsudin ini berakar pada ajaran Ibnu 'Arabi dan menganut paham martabat tujuh yang diperoleh dari Al-Tufah al-Mursalah ila Ruhin Nabi, karya Muhammad Fadhlullah al-Burhanpuri dari India. Sultan Iskandar Muda sangat tertarik dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh Syamsudin Pasai sehingga beliau termasuk salah seorang pengikut paham wujudiyah. Sejumlah karyanya yang dipersembahkan untuk sultan Iskandar Muda 10 antara lain Kitab Thariq al-Salihin dan Nur al-Daqaiq. Syamsudin Pasai meninggal dunia pada tahun 1630 M. bertepatan dengan Armada Aceh mengalami kekalahan di Malaka.

4. Nuruddi Ar-Raniri

Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 M. di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. (Windstedt, 1968: 145; Ahmad Daudy, 1983: 49). Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadhramaut. Sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Ar-Raniri lebih dikenal sbagai ulama besar Melayu-Indonesia daripada India dan Arab. Karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Iapun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 11 1637 M. dan mendapat kepercayaan dari sultan Iskandar Thani, sebagai Syaikhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaharuan Islam dengan radikal. Ia menentang paham Wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsudin AlSumatrani. Ar-Raniri menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam.

Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat akan dibunuh, dan banyak buku/kitab-kitab Hamzah Fansuri dibakar. Dalam

pembaharuannya, Ar-Raniri memperkenalkan corak keilmuan dan wacana keagamaan yang baru. Meskipun ia juga seorang penganut Wujudiah dan pengikut Ibnu 'Arabi, namun dalam menafsirkan ajaran wujudiyah ia ketat bertolak pada syariat dan fikih. Paham wujudiyah yang dianutnya tidak hanya penekanan pada tasawuf saja, tetapi juga menjelaskan kepada kaum Muslim Nusantara dasar-dasar keimanan, aturan-aturan fikih, perbandingan agama, pentingnya hadis, serta sejarah. Untuk menjelaskan semua itu, ia menerjemahkan dan menyusun kitab-kitab yang membahas berbagai macam pengetahuan dan sastra sesuai dengan kondisi umat Islam-pada saat itu.

Karya-karyanya cukup banyak lebih dari 40 kitab antara lain : 1. Sirat- al-Mustaqim (Jalan Lurus), merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa melayu. 2. Daral al- Faraid, membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan. 3. Lata'ih al-Asrar, 4. Hall al-Dzill ma'a Sahabihi, 5. Umdat al- I'tiqad, 6. Hujaj al-Sidiq, 7. Jauhar al-'Ulum, 8. Ma'al Hayat, dan lain-lain. 9. Bustanus al-Salatin, (Taman Para Raja) Nama lengkapnya kitab ini adalah Bustanu al-Salatin fi al-Awwaliin wa al-Akhirin. Kitab ini disusun atas permintaan Sultan Iskandar Thani, yang berisi masalah ketatanegaraan dan sejarah. Kitab ini merupakan penyempurnaan dari kitab Tajul al-Salatin (Mahkota Raja-raja) yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari. Kitab Bustanussalatin ini tidak hanya membahas tentang 12 ketatanegaraan, sejarah saja tetapi juga memuat eskatologi, dan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan fikih, tasawuf dan usuluddin. Karena tebalnya kitab ini sampai kini tidak diterbitkan secara utuh, hanya bagian bab demi bab saja diterbitkan dalam buku terpisah. Kitab Bustanussalatin ini sangat penting sebagai sumber penulisan sejarah Aceh yang mengisahkan tentang Sultan Iskandar Thani, Taman Raja yang dibangun sejak masa Sultan Iskandar Muda. Ada beberapa kitab tasawuf yang dikarangnya berisi hujatan dan kecaman pada Hamzah Fansuri dan Syamsudin al-Sumatrani. Peranan Ar-Raniri cukup besar dalam pembentukan tradisi keilmuan yang bercorak ortodoksi di Nusantara. Usaha pembaharuan Ar-Raniri tidak berlangsung lama karena reputasinya tergusur oleh murid dan pengikut Hamzah dan Syamsudin. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat Nuruddin Ar-Raniri meninggalkan Aceh dan kembali ke tanah airnya. Namanya kini diabadikan pada sebuah Perguruan Tinggi Islam yaitu "Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri".

5. Abdul Rauf al-Singkili Abdul Rauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili

Seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai Barat-Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 M. Ayahnya Syech Ali Fansuri masih bersaudara dengan Syech Hamzah Fansuri. Beliau menghabiskan waktunya selama 19 tahun untuk menuntut berbagai cabang ilmu Islam di Haramayn. Setelah selesai belajar berbagai macam ilmu agama ia kembali ke Aceh dan membaktikan dirinya di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin Abdul Rauf ini diangkat sebagai Mufti kesultanan Aceh menjadi Qadhi Malikul Adil. Dalam kiprahnya beliau melanjutkan usaha pembaharuan yang pernah

dirintis oleh Ar-Raniri. Tema sentral pembaharuannya diutamakan pada rekonsiliasi, dengan memadukan secara simponi tasawuf dan syariah. Kegagalan Ar-Raniri menentang menentang paham wujudiyah dilanjutkan oleh Abdul Rauf, tetapi tidak dengan jalan radikal. Beliau sangat bijaksana dalam menyikapi dua hal yang bertentangan dan tidak bersikap kejam terhadap mereka yang menganut paham lain. Beliau juga mengecam sikap radikal yang 14 dijalani Ar-Raniri. Dengan bijaksana mengingatkan kaum Muslimin Nusantara bahwa jangan tergesa-gesa dan bahayanya menuduh orang lain sesat atau kafir. Tarekat yang dijalankan Abdul Rauf adalah tarekat Syatariyah karena mengikuti dan telah mendapat ijazah dari gurunya Ahmad Al-Qusyasyi, sehingga nama beliau tercantum pada silsilah Syatariyah di Aceh. Bahkan nama Qusyasyi begitu dikenal dan melekat di daerah Sumatera dan Jawa, bahkan tarekat Syatariyah ini dalam naskah-naskah tertentu disebut tarekat Qusyasyiyah.

Abdul-rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf dan tafsir. Karya-karyanya antara lain: 1. Mir'atu ath-Thullab fi Tashil Ma'rifatil ahkam wasy-syar'iyah 2. Umdatul Muhtajin ila suluki Maslah al-Mufridin 3. Kifayat al- Muhtajin ila Suluk Maslak Kamal al-Tahbir 4. Li'l Malik al-Wahhab 5. Turjumun al- Muwahhidin al-qaili bi Wahdah al- Wujud Ulama Abdul Rauf ini seorang yang giat mengembangkan pemikiran dan penyebaran Islam dan banyak mencetak murid-murid yang juga memainkan peranan penting dalam penyebaran islam di berbagai daerah, sehingga menyebabkan jangkauan pengaruh Aceh sangat luas.

Di dalam kiprahnya mengajarkan dan mengembangkan agama Islam terus dilakukan, di dayahnya bernama Rangkang Teunku Syiah Kuala di Pantai Kuala, yang merupakan salah satu dayah/rangkang yang banyak menghasilkan ulama-ulama yang berkualitas sebagai penerusnya. Antara lain muridnya yang terkenal adalah Syech Burhanuddin dari Minangkabau yang turut berkiprah menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Syech Abdul Rauf meninggal dan dimakamkan di kuala raya Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Ketika terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh, makam ini rusak ringan dan kedua nisannya dalam keadaan patah leleh. Kemudian oleh pihak Yayasan Yamsika telah melakukan perbaikan dengan cara mengecor nisan tersebut lalu dipasangkan pada jirat makam. Hal itu dilakukan secara sepihak tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh dan instansi terkait lainnya. Sehingga tindakan ini telah menyalahi dari 15 prinsip teknis pemugaran, dan perlindungan cagar budaya sebagaimana telah diatur dalam undangundang nomor 11 tahun 2011 tentang cagar budaya. Foto: Kaligrafi arab berbunyi: "Al-Waly al-Mulky al-Haj Syech

Abdul-Rauf bin Aly, dalam khat Thulust yang terukir pada jirat Makam Tgk. Syiah Kuala Foto: Kondisi Makam Syech Abdul Rauf setelah rekonstruksi pasca tsunami³²

Berkenaan dengan pembesar-pembesar Aceh, Ali Hasjmy menulis 16 orang pembesar Aceh di zaman dahulu, yaitu:

1. Qadhi Malikul Adil (Tangan Kanan Sultan).
2. Seri Maharaja Lila (Perdana Menteri).
3. Rama Setia Katibul Muluk (Sekretaris Negara).
4. Seri Maharaja Mangkubumi (Yang mengurus segala Hulubalang, Menteri dan negeri).
5. Menteri Paduka Tuan (Pelaksana harian di Balai Rong Sari).
6. Menteri Paduka Raja (Menteri yang diperbantukan pada Sultan seperti Menteri Negara).
7. Menteri Seri Paduka (mengepalai Balai Furdhah, Menteri Perdagangan).
8. Wazirul Harb Laksamana (yang mengurus Angkatan Darat dan Angkatan Laut, juga masalahmasalah laut lainnya).
9. Wazir Badlul Muluk (mengurus perutusanperutusan dari luar negeri dan perutusanperutusan Aceh keluar negeri, seperti Menteri Luar Negeri).
10. Orangkaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Derham (Menteri Keuangan).
11. Seri Raja Panglima Wazir Mizan (Menteri 230 Untuk kesempurnaannya silakan baca: Ramli Harun, Tjut Rahma M.A.Gani, Adat Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, tt.), hlm. 69 144 | Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam Kehakiman)
12. Wazir Kun Diraja, yaitu Menteri urusan Dalam (Keraton) yang merangkap dengan Syahbandar (Datuk Bandar) Banda Aceh Darussalam.
13. Menteri Rama Setia (yang mengurus cukai pekan di seluruh Aceh).
14. Seri Maharaja Gurah (pegawai yang mengurus hasil-hasil hutan dan segala yang bersangkutan paut dengan hutan seperti Menteri Kehutanan).
15. Seri Maharaja Garut (Ketua Majlis Kerajaan).
16. Maharaja Purba Paduka Raja (Keujruen dalam Darud Dunia).³³

Gelar ulama diperoleh seseorang dengan dua syarat: pertama, mempunyai pengetahuan agama Islam; dan kedua, adanya pengakuan dari masyarakat. Syarat pertama dapat dipenuhi seseorang sesudah ia menempuh masa belajar yang cukup lama. 218 Sedangkan syarat kedua baru dapat dipenuhi setelah masyarakat melihat kemuliaan akhlak, kedalaman pengetahuan, dan ketaatannya terhadap ajaran agama Islam. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu tidak cukup untuk

³²Masruarini & Bahaking Rama, *Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh: Lembaga dan Tokohnya*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal, Vol. 2 No.2 Tahun 2022, h. 202.

³³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam* (Cet. I; Banda Aceh: Nasa, 2013), h. 138.

menarik pengakuan dari masyarakat. Di Aceh, ulama umumnya tamatan dayah (pesantren). Sedangkan tamatan universitas tidak disebut ulama. Dalam masyarakat Aceh terdapat sekelompok ulama (tradisional) dipanggil dengan sebutan Teungku (Tgk) di depan namanya, sedangkan ulama intelektual umumnya jebolan Perguruan Tinggi. Ada kelompok turunan Raja/Sultan sering dipanggil dengan sebutan Tuwanku (Twk) di depan namanya. Kelompok turunan Ulee Balang/Bangsawan yang umumnya memegang kekuasaan di masa penjajah Belanda dipanggil dengan sebutan Teuku (T), di depan namanya. Di samping itu ada pula kelompok masyarakat Aceh yang menghubungkan diri mereka dengan keturunan keluarga Nabi Muhammad yang dipanggil dengan Habibatau lebih populer dengan Said (S) di depan namanya. Namun semua strata kedudukan sosial itu tidak menimbulkan hak-hak istimewa pada bidang sosial politik dalam masyarakat, melainkan tergantung pada kemampuan dan kekuatan usahanya. (Imran. 2020:197-198). Imran juga menyebutkan bahwa masyarakat Aceh sangat menghargai seorang ulama atau orang yang alim, karena seorang ulama selain sebagai Waratsatul Anbiya (pewaris para nabi) sekaligus sebagai penuntun umat ke jalan Allah. Di samping itu, ulama sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tanpa melibatkan dirinya dalam kegiatan politik praktis. Setiap ulama yang melibatkan diri dalam politik praktis diragukan keberadaannya oleh masyarakat. Karena, dalam perspektif masyarakat Aceh, ulama yang berkecimpung dalam politik atau pemerintahan ternodai oleh perilaku menyimpang, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan jauh dari masyarakat. Kana itu, pesantren tempo dulu enggan menerima sumbangan dari pemerintah. Keengganan menerima sumbangan dari pemerintah karena mereka menganggap sumbangan tersebut erat kaitannya dengan unsur-unsur politik. Yang mengikat, terutama pada masa Orde Baru. Biasanya pembangunan dayah/pesantren dilakukan oleh ulama bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Seorang ulama yang sudah terkenal alim dan berwibawa menjadi panutan dan tempat bertanya, baik bidang agama maupun bidang-bidang lainnya (Imran. 2020:199) Seorang tokoh pendidikan agama Islam lainnya di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Beliau adalah salah seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran wujudiyah. Adapun sebagian karya-karya beliau adalah Asrar Al-Aufin, Syarab Al-Asyikin, dan Zuiat Al-Nuwahidin. Sebagai seorang pujangga beliau juga menghasilkan karya-karya seperti Syair si burung pungguk, syair perahu. Tokoh lain yang penting yaitu Syamsuddin As-Samathrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang juga mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Kitab yang ditulis, Mir'atul al-Qulub, Miratul Mukmin dan lainnya. Ulama dan pujangga lain yang pernah datang ke kerajaan Aceh ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau ulama yang menentang paham wujudiyah dan menulis banyak kitab mengenai agama Islam dalam bahasa Arab maupun Melayu

klasik. Kitab yang terbesar dan tertinggi mutu dalam kesustraan Melayu klasik dan berisi tentang sejarah kerajaan Aceh karangan beliau adalah kitab *Bustanul Salatin*.³⁴

SIMPULAN

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh membawa pengaruh yang sangat pesat terhadap perkembangan pendidikan Islam, masyarakat Aceh mengenal dunia pendidikan yang akhirnya mereka mendalami ilmu agama Islam sebagai pondasi dalam beribadah, banyak orang yang datang belajar di Aceh tentang ilmu pendidikan Islam dan pada akhirnya kembali ke wilayah masing-masing untuk mengembangkan Islam akhirnya Islam berkembang di berbagai wilayah.

Beberapa tokoh ulama telah memainkan peranan penting dalam Penyebaran Islam masa awal di Aceh dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mereka telah berjuang dan berkiprah dalam usaha memperkenalkan nilai-nilai Islam dan benar-benar mengajak masyarakat untuk melakukan syariat Islam dengan menyampaikan ajaran-ajaran ortodoksi (ajaran yang berpeganghanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunah). Dengan melalui karya-karya kitab yang disusunnya, dan dalam bahasa sastra yang indah sehingga pengamalan nilai-nilai ajarannya dengan mudah dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Bukti kejayaan dan kebesaran ulama-ulama besar tersebut kini dapat disaksikan sebagai saksi sejarah dengan masih adanya pusara/makam-makam di Banda Aceh dan di Kota Subulussalam. Tinggalan-tinggalan sejarah tersebut harus tetap dilindungi, dijaga dan dirawat agar dapat dilestarikan kepada generasi mendatang, sebagai cagar budaya.

Referensi :

- Ali Akbar, 1999. Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara, (Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara, 1990), hlm.1. Lihat juga: Hasanuddin Yusuf Adan, Konsep Mujarab Membangun Aceh, kertas kerja disampaikan pada Forum Usrah Tanoh Rincong Students Association (TARSA) Malaysia, Petaling Jaya.
- Amiruddin, M. Hasbi. ,2008. Mentap Masa Depan Dayah di Aceh, Banda Aceh; Yayasan PeNA
- Buto Siregar, Zulfikar Ali dan Hafifuddin, t.th. Inovasi Kurikulum Dayah Memenuhi Standar dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Aceh.
- Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, hlm. 8
- Hadi WM, Abduh dan Azra, Azymardi. 2015. Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam. Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta.
- Hadi WM, Abduh dan Azra, Azymardi. 2015. Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, Cet. I; Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya: Jakarta.

³⁴ Masruarini & Bahaking Rama, *Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh: Lembaga dan Tokohnya*, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, Vol. 2 No.2 Tahun 2022, h. 204-208.

<https://www.scribd.com/doc/177631358/MANAJEMEN-DAYAH>

- M. Sadli ZA, 2001. Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang, dalam Abuddin Nata (Ed). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Marhamah, 2022. Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh, Buku Pendidikan Islam.
- Mashuri, 2013. Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Daya, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. XIII No. 2.
- Masruarini & Rama, Bahaking. 2022. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh: Lembaga dan Tokohnya, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal, Vol. 2 No.2.
- Mohd. Nasir, dkk. 2018. Narasi Pendidikan Islam di Aceh: Biografi Intelektual M. Arifin Amin. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 42 No. 2.
- Mujiburrahman dkk., 2016. Pendidikan Berbasis Syariat Islam. Cet. I; Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Nurainia, 2021. Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh, Jurnal Serambi Tarbawi, Vol. 9 No.1.
- Osman Raliby, t.t. Atjeh, its History and Cultural¹", Sinar Darussalam No.10, Banda Aceh.
- Sufi , Rusdi dan Wibowo, Agus Budi, 2009. Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa. (Cet. I; Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan NAD.
- Thomas W. Arnold, 1980. The Preaching of Islam, terj. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1979), hlm. 317. Lihat juga: Tim Sejarah Aceh Timur, Makalah Seminar: Masuknya Islam di Peureulak Aceh Timur dan Perkembangannya, Aceh Timur.
- Tjandrasasmita, Uka, t.th. Proses kedatangan Islam dan munculnya kerajaankerajaan Islam di Aceh, Dalam: Sinar Darussalam No.112 & 113, Banda Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_18.pdf
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/413
- Usman , A. Samad dan Hadi, Abd., 2021. Manajemen Lembaga Pendidikan Dayah, Jurnal Intektualita UIN Ar-Raniry Vol. 10. No. 2.
- Yusuf Adan, Hasanuddin. 2013. Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam. Cet. I; Banda Aceh: Nasa.
- Aceh dalam Angka (Aceh in Figures). 2003. Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah